



BBPPTP Surabaya

LAPORAN

PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK

2024



DIREKTORAT JENDERAL
PERKABUNAN
KEMENTERIAN PERTANIAN

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR GRAFIK	iv
KATA PENGANTAR	v
A. PPID Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya	1
B. Program dan Kegiatan PPID BBPPTP Surabaya.....	3
C. Maklumat Layanan PPID	7
D. Sumber Daya Manusia dan Anggaran PPID	8
E. Sarana dan Prasarana Pengelolaan Informasi Publik.....	10
a. Ruang Tamu.....	10
b. Sarana Digital	13
c. Sarana Ramah Penyandang Dissabilitas	16
F. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik	17
G. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik	19
H. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Keberatan Beserta Alasan Pengajuan Keberatan	20
I. Rekapitulasi Permohonan yang Ditolak Beserta Alasannya	20
J. Jumlah Pemohon Informasi Publik Berdasarkan kategori Pengelompokan.....	20
K. Pengelolaan Website Dan Media Sosial.....	21
L. Inovasi Dan Kolaborasi Layanan Informasi Di Bbpptp Surabaya.....	23
M. Kendala Dan Tantangan Beserta Solusi	24
N. PENUTUP.....	25

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rencana Kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Publik BBPPTP Surabaya Tahun 2024	6
Tabel 2. Jumlah Permohonan Informasi Melalui Email.....	17
Tabel 3. Jumlah Permohonan Informasi Melalui Whatsapp/Telepon.....	17
Tabel 4. Rekapitulasi Jumlah Konten Media Sosial Tahun 2024	22

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Struktur Organisasi PPID BBPPTP Surabaya Tahun 2024	4
Gambar 2.	Maklumat Layanan BBPPTP Surabaya	8
Gambar 3.	Tim Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya Tahun 2024 ...	9
Gambar 4.	Resepsionis BBPPTP Surabaya	11
Gambar 5.	Meja Layanan Informasi	11
Gambar 6.	Ruang Tunggu BBPPTP Surabaya Ruang PPID	12
Gambar 7.	Ruang Konsultasi Layanan Informasi BBPPTP Surabaya	12
Gambar 8.	Portal PPID BBPPTP Surabaya	14
Gambar 9.	Tampilan Website BBPPTP Surabaya	15
Gambar 10.	Tampilan layanan SIM-OPT BBPPTP Surabaya	16
Gambar 11.	Sarana ramah disabilitas	16
Gambar 12.	Tampilan Dashboard SIM OPT	24
Gambar 13.	Penghargaan BBPPTP Surabaya sebagai Unit Kerja Eselon II Kategori Informatif	26

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024	19
Grafik 2. Jumlah Kunjungan ke Website BBPPTP Surabaya Tahun 2024	21

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga laporan Tahunan Layanan Informasi Publik PPID BBPPTP Surabaya Tahun 2024 dapat terwujud. Laporan ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan yang melekat pada tugas dan fungsi BBPPTP Surabaya, sekaligus sebagai bahan informasi mengenai kegiatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Publik BBPPTP Surabaya.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pegawai yang telah membantu pelaksanaan kegiatan ini. Data dan informasi yang diperoleh diharapkan dapat menjadi masukan dan dasar pengambilan kebijakan dalam penyelenggaraan layanan informasi publik pada tahun berikutnya.

Akhirnya kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu kami mengharapkan saran, kritik dan masukan agar laporan ini menjadi lebih baik. Semoga laporan ini bermanfaat bagi perkembangan kegiatan layanan informasi dan dokumentasi publik di BBPPTP Surabaya.



Jombang, 22 Januari 2025
Kepala Balai,

I. Tommy Nugraha, M.M.
NIP. 196907021993031002

LAPORAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2024

A. **PPID Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya**

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) merupakan momentum penting mendorong keterbukaan informasi publik di Indonesia. UU KIP ini bertujuan membawa perubahan paradigma Badan Publik dalam mengelola Informasi Publik dari pemerintahan yang tertutup menuju pemerintahan yang terbuka. Setelah UU KIP diundangkan, paradigma bergeser menjadi seluruh Informasi Publik adalah terbuka untuk diakses masyarakat kecuali yang dirahasiakan.

Badan Publik seperti Kementerian Pertanian juga wajib membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien, sehingga layanan informasi dapat diakses dengan mudah. Bahkan lebih lanjut, setiap Badan Publik perlu melakukan pengelolaan informasi publik dan dokumentasi yang dapat menjamin penyediaan informasi dengan mudah, cermat, cepat dan akurat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Transparansi atas setiap informasi publik menjadikan masyarakat dapat ikut berpartisipasi aktif dalam mengontrol setiap langkah dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah sehingga penyelenggaraan kekuasaan dalam negara demokrasi dapat dipertanggungjawabkan kembali kepada masyarakat. Keterbukaan informasi publik merupakan pondasi dalam membangun tata pemerintahan yang baik (*Good governance*). Pemerintahan yang transparan, terbuka dan partisipatoris dalam seluruh proses pengelolaan kenegaraan termasuk seluruh proses pengelolaan sumber daya publik sejak dari proses pengambil keputusan, pelaksanaan serta evaluasinya. Eksistensi regulasi mengenai keterbukaan informasi publik dapat mendorong suatu masyarakat menjadi lebih demokratis dengan memungkinkan adanya akses masyarakat terhadap informasi yang dimiliki pemerintah baik pemerintah pusat,

pemerintah daerah maupun lembaga-lembaga publik lain seperti lembaga pendidikan dan lembaga lainnya.

Sebagaimana diatur pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Badan publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan. Badan publik yang dimaksud meliputi eksekutif, legislatif dan yudikatif baik yang berada di pusat maupun daerah, BUMN, partai politik dan LSM.

Direktorat Jenderal Perkebunan sebagai salah satu bagian dari badan publik di lingkup eksekutif dalam rangka reformasi birokrasi menyadari bahwa keterbukaan informasi publik menjadi salah satu prasyarat menuju tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel. Untuk itu setiap unit kerja di lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan dituntut dapat menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang lengkap, valid, mudah dimengerti dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang berada di bawah kewenangannya selain informasi yang dikecualikan dengan ketentuan.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di BBPPTP Surabaya adalah Kepala BBPPTP Surabaya dan Pejabat Pengelola Informasi (PPID) Pembantu Pelaksana adalah Kepala Bagian Umum. PPID Pelaksana dan PPID Pembantu Pelaksana ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor 57/Kpts/HM.130/05/2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan Pejabat Pengelola Informasi (PPID) Pembantu Pelaksana Lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan.

BBPPTP Surabaya mewujudkan keterbukaan informasi dengan selalu

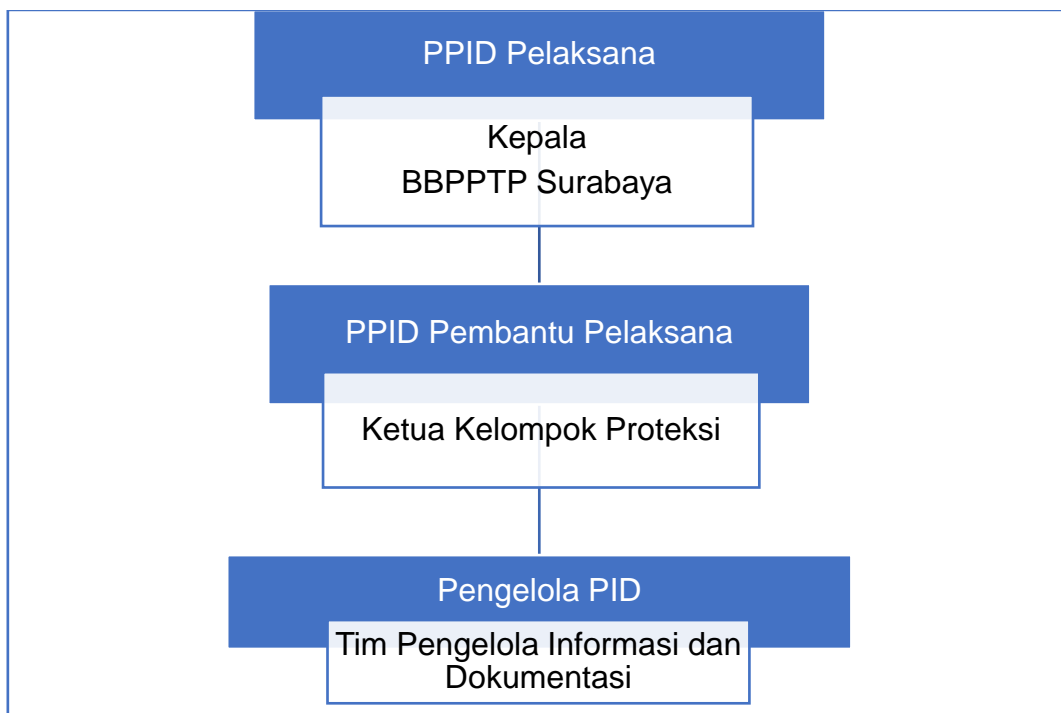
berusaha meningkatkan kualitas layanan dalam pemberian informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Berikut adalah surat keputusan yang sudah diterbitkan oleh BBPPTP Surabaya di tahun 2024 terkait dengan Keterbukaan Informasi Publik:

1. Keputusan Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya Nomor 30/Kpts/Hm.130/E7/01/2024 tentang Tim Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya Tahun 2024;
2. Keputusan Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya Nomor 071/Kpts/Hm.130/E7/03/2024 tentang Penetapan Daftar Informasi Publik Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya Tahun 2024.

Pengelolaan PPID di BBPPTP Surabaya meliputi kegiatan pengumpulan Informasi Publik yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, wajib tersedia, dan yang wajib diumumkan secara serta merta. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dapat diakses oleh publik secara langsung dengan melalui website BBPPTP Surabaya (<https://balaisurabaya.ditjenbun.pertanian.go.id/>) atau melalui halaman Data Dokumen di Portal PPID BBPPTP Surabaya (<https://bbpptbun-sby-pid.pertanian.go.id/index.php/edocument/index/portal>). Informasi tersebut dipelihara dan diperbaharui untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas informasi dari BBPPTP Surabaya.

B. Program dan Kegiatan PPID BBPPTP Surabaya

Untuk pelaksanaan/operasional pelayanan Informasi Publik PPID BBPPTP Surabaya didukung oleh PPID Pembantu Pelaksana dan Tim Pengelola dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi PPID BBPPTP Surabaya Tahun 2024

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Mengoordinasikan, penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan informasi, dan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat dan sederhana di Unit Kerja Direktorat Jenderal Perkebunan atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan;
2. Menyiapkan bahan pengujian konsekuensi di Unit Kerja Direktorat Jenderal Perkebunan atau UPT lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan;
3. Menerbitkan daftar informasi publik di Unit Kerja Direktorat Jenderal Perkebunan atau UPT lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan;
4. Menyiapkan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
5. Menyiapkan klasifikasi informasi publik;
6. Melakukan fasilitasi terhadap sengketa informasi publik; dan

7. Menyusun laporan secara berkala (bulanan dan tahunan), secara berjenjang dari PPID Pelaksana UPT kepada PPID Pelaksana Unit Kerja Direktorat Jenderal Perkebunan dengan tembusan kepada PPID Utama Kementerian Pertanian dan Sekretaris Direktorat Jenderal Perkebunan selaku atasan langsung PPID Pelaksana Unit Kerja Direktorat Jenderal Perkebunan atau Kepala UPT selaku atasan langsung PPID Pelaksana UPT lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menyiapkan bahan penyediaan pelayanan informasi publik secara cepat, tepat, dan sederhana di lingkup Unit Kerja Eselon II Direktorat Jenderal Perkebunan atau UPT lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan;
2. Menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan informasi secara tepat di lingkup Unit Kerja Eselon II Direktorat Jenderal Perkebunan atau UPT lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan;
3. Menyiapkan bahan saran/tanggapan atas permohonan, keberatan dan/atau sengketa pelayanan informasi publik;
4. Menyiapkan bahan klasifikasi informasi; dan
5. Menyusun bahan laporan secara berkala (bulanan dan tahunan), secara berjenjang dari PPID Pembantu Pelaksana Unit Kerja Eselon II kepada PPID Pelaksana Unit Kerja Direktorat Jenderal Perkebunan dengan tembusan kepada Direktur Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan selaku atasan langsung PPID Pembantu Pelaksana Unit Kerja Eselon II atau PPID Pembantu Pelaksana UPT kepada PPID Pelaksana UPT lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan.

Untuk memperlancar kegiatan pelayanan publik di BBPPTP Surabaya, telah disusun rencana kegiatan pengelolaan dan pelayanan publik BBPPTP Surabaya tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 1. Rencana Kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Publik BBPPTP Surabaya Tahun 2024

No.	Nama Kegiatan	Hasil Yang Ingin Dicapai			Jawal Pelaksanaan
		Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja	
	Memberikan pelayanan atas permintaan informasi Publik dan dokumen oleh masyarakat	Terwujud pelayanan informasi publik yang berkualitas	Pelayanan informasi publik yang mudah dan cepat	Terpenuhi permohonan informasi publik	Reguler (jam kerja)
	Melakukan Verifikasi bahan informasi publik dan menyusun klasifikasi informasi publik	Tersusun klasifikasi informasi publik yang akurat dan berkualitas	Klasifikasi informasi publik sesuai/mengacu pada peraturan perundang-undangan dan melalui proses uji konsekuensi yang berkualitas	Tersusun Daftar Informasi Publik [DIP] untuk tahun 2023	Reguler (jam kerja)
	Melakukan pengumpulan dokumen informasi publik yang ada di lingkungan BBPPTP Surabaya	Terkumpulnya dokumen informasi publik secara terpusat	Penguasaan seluruh Dokumen Informasi Publik oleh PPID Pembantu	Seluruh Dokumen informasi publik tersedia di ruang layanan dokumen informasi publik	Reguler (jam kerja)
	Mengelola keberatan, Pengaduan Dan Penyelesaian Sengketa [ayanan Informasi Publik	Tertanganinya keberatan atau komplain masyarakat terkait penyampaian dan layanan informasi Publik	Penanganan Keberatan dan komplain yang masuk terkait layanan informasi bisa dilaksanakan dengan administrasi yang baik	Setiap keberatan dan komplain yang masuk dapat di tangani dan di administrasi dengan baik dan tepat	Reguler (jam kerja)
	Penyampaian Informasi Publik yang lengkap dan Update melalui Website BBPPTP Surabaya, Portal PPID Pembantu dan Portal Open Data PPID	Terwujudnya website BBPPTP Surabaya dan Portal PPID BBPPTP Surabaya yang berkualitas	Desain website yang berkualitas dan konten informasi public yang lengkap dan selalu update	Website dan Portal PPID Pembantu memiliki tampilan yang menarik dan menampilkan dokumen informasi publik yang	Reguler (jam kerja)

No.	Nama Kegiatan	Hasil Yang Ingin Dicapai			Jawal Pelaksanaan
		Sasaran	Indikator Kinerja	Target Kinerja	
	BBPPTP Surabaya			wajib disampaikan kepada publik secara lengkap	
	Penyampaian informasi Publik dan event-event BBPPTP Surabaya yang selalu Update melalui media sosial resmi BBPPTP Surabaya (FB, Twitter, IG)	Terwujudnya pengelolaan media sosial Resmi BBPPTP Surabaya yang berkualitas	Konten berita dan informasi publik yang lengkap dan selalu update di media sosial	Media Sosial resmi BBPPTP Surabaya menampilkan berita & informasi publik seputar kegiatan dan capaian kinerja BBPPTP Surabaya secara lengkap dan update	Reguler (jam kerja)

C. **Maklumat Layanan PPID**

Untuk menegaskan komitmen penyelenggara layanan agar melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara layanan dengan baik, dan sesuai standar yang telah ditetapkan maka disusun dan ditetapkan serta dipublikasikan Maklumat Layanan oleh BBPPTP Surabaya sebagaimana berikut:



Gambar 2. Maklumat Layanan BBPPTP Surabaya

D. Sumber Daya Manusia dan Anggaran PPID

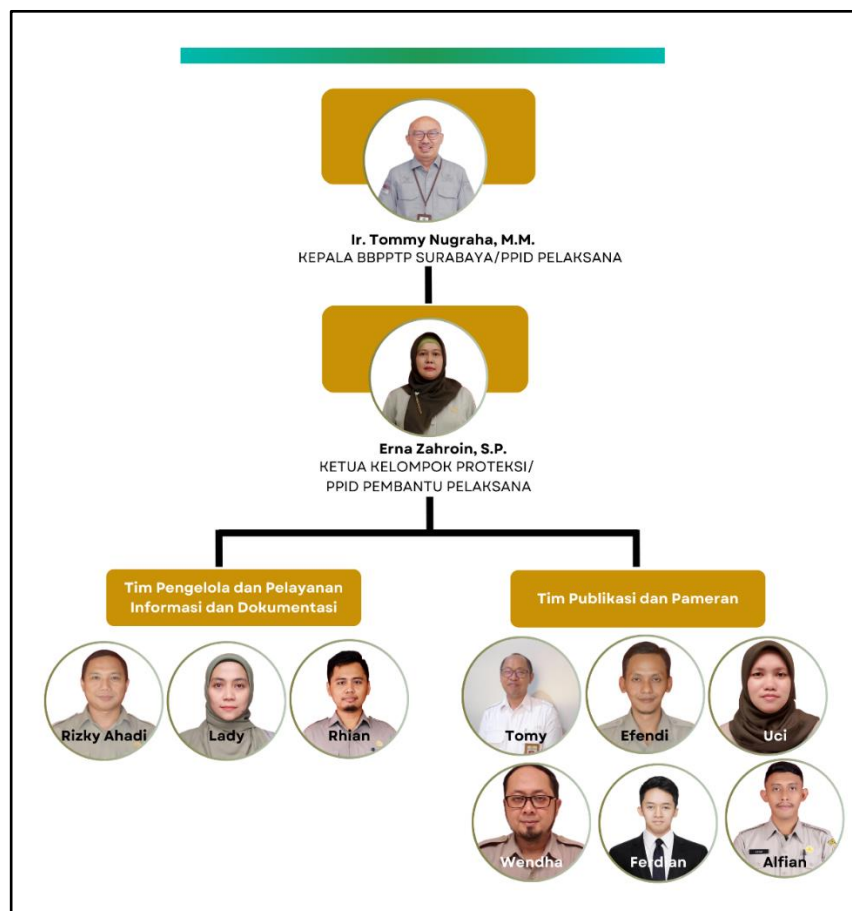
Pada tahun 2024 PPID Pelaksana pada BBPPTP Surabaya ditunjuk melalui Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana Lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan Nomor 56/Kpts/HM.130/05/2024. Berdasarkan Keputusan Direktorat Jenderal Perkebunan tersebut maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. PPID Pelaksana pada BBPPTP Surabaya adalah Kepala BBPPTP Surabaya; dan
2. PPID Pembantu Pelaksana pada BBPPTP Surabaya adalah Ketua Kelompok Proteksi.

Demi mewujudkan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana, perlu dilakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi yang dipimpin Kepala Bagian Umum dan staf pelaksana. Penunjukan tersebut berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan tentang Tim Pengelola

dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Lingkup Direktorat Jenderal Perkebunan Nomor 57/Kpts/HM.130/05/2024.

Dalam pelaksanaan tugas harian, telah ditunjuk SDM untuk menjalankan fungsi pelayanan informasi dan dokumentasi publik berdasarkan Keputusan Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya Nomor 30/Kpts/HM.130/E7/01/2024 tentang Tim Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya Tahun 2024, sebagai berikut:



Gambar 3. Tim Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi (PID) Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya Tahun 2024

Selama tahun 2024 kegiatan layanan informasi publik terfasilitasi dengan anggaran dalam DIPA Nomor DIPA- 018.05.2.567338/2024. Anggaran berasal dari rupiah murni berbunyi 1) Fasilitasi Layanan Publik sebesar Rp

36.000.000,- dan 2) Publikasi dan Pameran sebesar Rp 133.500.000,- dengan rincian komponen sebagai berikut:

1. Fasilitasi Layanan Publik

- a) Perjalanan Tim Medsos Rp 12.000.000,-
- b) Perjalanan dalam rangka pendukung PPID Rp 24.000.000,-

2. Publikasi dan Pameran

- a) Bahan pendukung kegiatan pameran Rp 30.000.000,-
- b) Media Publikasi Rp 7.500.000,-
- c) Perjalanan dinas biasa dalam rangka:
 - pelaksanaan pameran Rp 60.000.000,-
 - Perjalanan tim medsos dalam rangka peliputan kegiatan / acara Rp 24.000.000,-
 - Koordinasi / konsultasi dengan pusat / instansi terkait Rp 12.000.000,-.

E. Sarana dan Prasarana Pengelolaan Informasi Publik

a. Ruang Tamu

Lobi BBPPTP Surabaya adalah tempat tamu menunggu sebelum diarahkan sesuai layanan yang dibutuhkan. Lobi gedung layanan memiliki sarana seperti kamar mandi dan beberapa materi informasi dan edukasi cetak baik dalam format brosur maupun banner. Resepsionis selalu siap melayani tamu BBPPTP Surabaya.



Gambar 4. Resepsionis BBPPTP Surabaya



Gambar 5. Meja Layanan Informasi



Gambar 6. Ruang Tunggu BBPPTP Surabaya Ruang PPID

BBPPTP Surabaya menyediakan ruang layanan PPID berada di sebelah lobi gedung pelayanan, dilengkapi dengan akses internet dan pendingin ruangan.



Gambar 7. Ruang Konsultasi Layanan Informasi BBPPTP Surabaya

Selain itu untuk mendukung layanan informasi publik, BBPPTP Surabaya juga menyediakan ruang rapat di lantai 2 gedung pelayanan serta aula

yang dapat difungsikan menjadi ruang layanan publik maupun digunakan untuk rapat koordinasi.

b. Sarana Digital

Selain sarana dan prasarana fisik yang dimanfaatkan untuk kepentingan pelayanan informasi publik, BBPPTP Surabaya juga memanfaatkan sarana digital untuk menjangkau lebih luas lagi layanan publik yang dapat diberikan kepada masyarakat.

Sarana digital tersebut antara lain:

1) Portal PPID

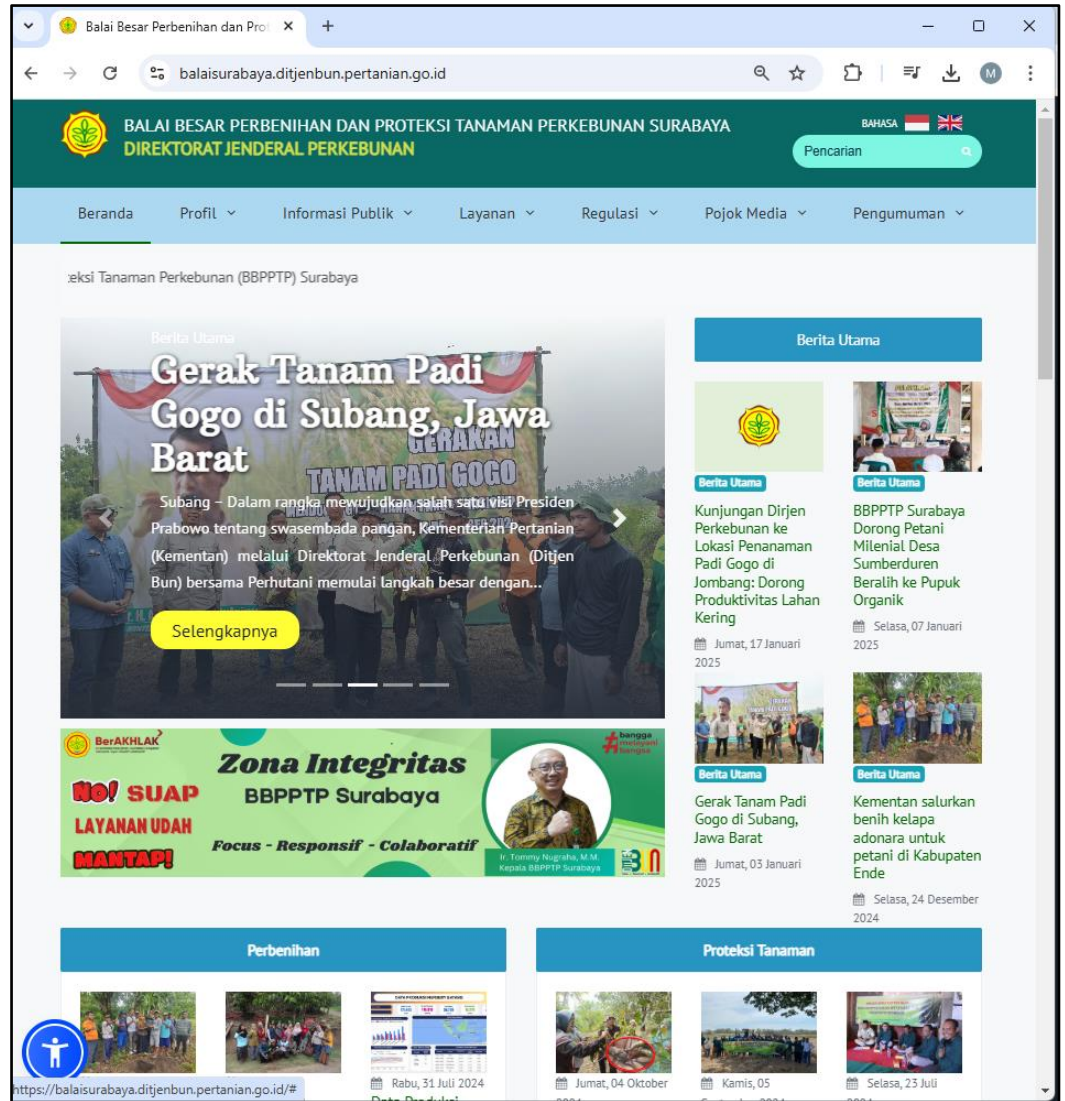
Portal PPID merupakan fasilitas dari PPID Utama Kementerian Pertanian dan dapat diakses dari website resmi BBPPTP Surabaya. Link portal PPID adalah <https://bbpptbun-sby-ppid.pertanian.go.id/>.



Gambar 8. Portal PPID BBPPTP Surabaya

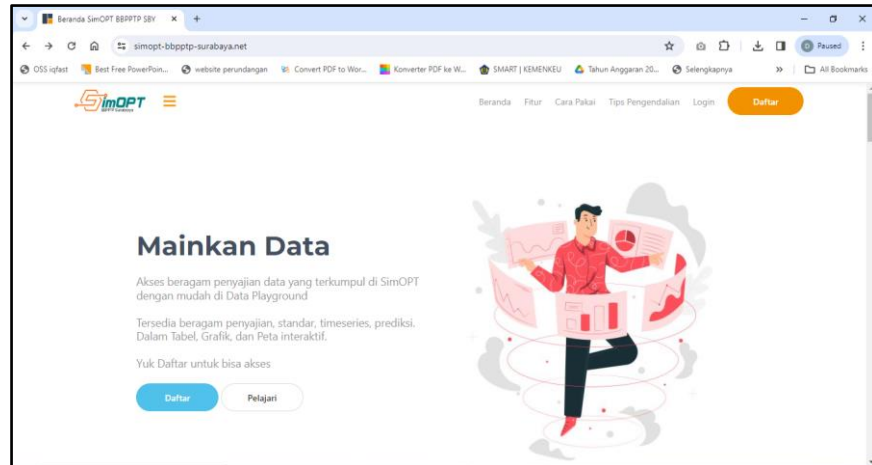
2) Website resmi BBPPTP Surabaya

Website BBPPTP Surabaya dibuat sebagai media layanan publik yang disediakan untuk mengetahui informasi tentang kinerja BBPPTP Surabaya maupun informasi lain terkait dengan penyelenggaraan layanan publik oleh BBPPTP Surabaya. Website BBPPTP Surabaya dapat diakses setiap saat tanpa batasan waktu melalui <http://balaisurabaya.ditjenbun.pertanian.go.id/>.



Gambar 9. Tampilan Website BBPPTP Surabaya

- 3) Aplikasi berbasis website SIM-OPT (Sistem Informasi Manajemen Organisme Pengganggu Tumbuhan) merupakan inovasi BBPPTP Surabaya yang dibuat untuk memberikan manfaat bagi masyarakat petani perkebunan secara optimal dalam situasi apapun dan mempermudah masyarakat memperoleh informasi yang benar dan jelas terkait kegiatan penanggulangan dan pengendalian serangan OPT.



Gambar 10. Tampilan layanan SIM-OPT BPPPTP Surabaya

c. Sarana Ramah Penyandang Dissabilitas

Sarana ramah bagi penyandang dissabilitas disediakan oleh BPPPTP Surabaya sebagai bentuk komitmen terhadap layanan yang diberikan kepada masyarakat secara adil. Sara tersebut antara lain penyediaan buku standar pelayanan publik dalam bentuk huruf braille, jalur kursi roda, kursi roda, video informasi menggunakan teks serta juru isyarat dan layanan aksesibilitas pada website resmi BPPPTP Surabaya.



Gambar 11. Sarana ramah dissabilitas

F. Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik

Sepanjang tahun 2024 BBPPTP Surabaya menerima total permohonan informasi sebanyak 34 permohonan dan secara keseluruhan telah dipenuhi 100%.

1) Permohonan Informasi Melalui Email

Tabel 2. Jumlah Permohonan Informasi Melalui Email

No.	Informasi Publik
1.	Permohonan informasi tentang penerimaan praktek kerja lapang di BBPPTP Surabaya
2.	Permohonan informasi tentang penerimaan praktek kerja lapang di BBPPTP Surabaya
3.	Permohonan informasi tentang cara perolehan bibit kelapa kopyor asal kultur jaringan

Pada tahun 2024, terdapat 3 (tiga) permohonan informasi melalui email resmi BBPPTP Surabaya yaitu balaibesarsurabaya@pertanian.go.id. Permohonan informasi melalui email terkendala karena seringnya email resmi dengan domain pertanian.go.id mengalami eror tidak dapat login, tidak bisa mengirimkan email balasan kepada email dengan domain lain dan terkadang tidak bisa menerima email masuk dari domain selain pertanian.go.id.

2) Permohonan Informasi Melalui Whatsapp/Telepon

Tabel 3. Jumlah Permohonan Informasi Melalui Whatsapp/Telepon

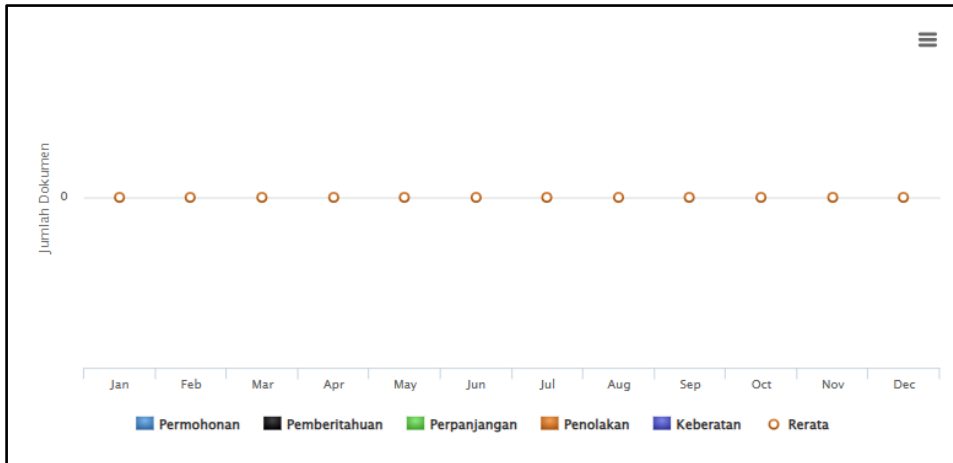
No.	Informasi Publik
1.	Permohonan informasi tentang uji profenofos dan drazinom untuk sampel air laut / kolam
2.	Permohonan informasi tentang formasi PKL mahasiswa
3.	Permohonan informasi tentang uji residu pestisida pada jagung
4.	Permohonan informasi tentang uji kadar residu pestisida dengan metode screening
5.	Permohonan informasi tentang uji pestisida pada produk paprika
6.	Permohonan informasi tentang uji lab produk biopestisida
7.	Permohonan informasi tentang uji kandungan pestisida nabati dari biji jengkol
8.	Permohonan informasi tentang ketersediaan telur atau imago serangga Corcyra
9.	Permohonan informasi tentang ketersediaan isolat jamur

No.	Informasi Publik
10.	Permohonan informasi tentang layanan konsultasi pupuk
11.	Permohonan informasi tentang uji lab DNA beras
12.	Permohonan informasi tentang rekomendasi prakiraan OPT
13.	Permohonan informasi tentang perijinan benih sawit kecambah
14.	Permohonan informasi tentang pengujian kerapatan spora
15.	Permohonan informasi tentang formasi PKL mahasiswa
16.	Permohonan informasi tentang alur kunjungan kerja ke BBPPTP Surabaya
17.	Permohonan informasi tentang formasi PKL mahasiswa
18.	Permohonan informasi tentang formasi PKL mahasiswa
19.	Permohonan informasi tentang ketersediaan benih kelapa Kopyor genjah
20.	Permohonan informasi tentang prosedur memperoleh bantuan benih jambu mete
21.	Permohonan informasi tentang ketersediaan benih kelapa genjah
22.	Permohonan informasi tentang pengujian residu pestisida
23.	Permohonan informasi tentang magang/PKL
24.	Permohonan informasi tentang kelengkapan dokumen ekspor
25.	Permohonan informasi tentang jam kerja layanan laboratorium di BBPPTP Surabaya
26.	Permohonan informasi tentang pengujian sampel residu pestisida yang terdapat pada serangga
27.	Permohonan informasi tentang magang/PKL
28.	Permohonan informasi tentang magang/PKL
29.	Permohonan informasi tentang magang/PKL
30.	Permohonan informasi tentang pengadaan benih tanaman Perkebunan di provinsi Sulawesi Barat
31.	Permohonan informasi tentang data luas serangan hama harian & data individu harian pada hama Penggerek Batang Kopi (PBKo) periode tahun 2015 - September 2024

Pada tahun 2024, terdapat permohonan informasi melalui Whatsapp (WA) sebanyak 31 permohonan. Layanan WA baru diselenggarakan pada bulan Oktober 2024 untuk memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi dasar yang dibutuhkan.

3) Portal PPID

Pada tahun 2024 tidak ada permohonan informasi melalui portal PPID.



Grafik 1. Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik Tahun 2024

Informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan oleh masyarakat pengguna telah dipublikasikan melalui website, portal PPID dan media sosial yang dikelola BBPPTP Surabaya.

4) Kunjungan Langsung

Pada tahun 2024 tidak ada permohonan informasi dan dokumentasi pada melalui kunjungan langsung ke BBPPTP Surabaya.

G. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Informasi Publik

Rata-rata waktu pelayanan informasi publik PPID BBPPTP Surabaya melalui WA dan email nilai rata-rata pelayanan adalah 1,5 hari. Sedangkan waktu layanan tercepat adalah 0 hari yang berarti permohonan informasi langsung diberikan pada hari yang sama dan waktu pelayanan terlama adalah 7 hari.

Berdasarkan Keputusan Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Nomor B-62/Kpts/HM.130/A.7/04/2018 tentang Panduan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan untuk Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik pada Kementerian Pertanian, maka BBPPTP Surabaya berada dalam kategori 1-2 hari (Baik Sekali).

H. Rekapitulasi Waktu Pelayanan Keberatan Beserta Alasan Pengajuan Keberatan

Pada tahun 2024 tidak ada pemohon informasi publik yang mengajukan keberatan.

I. Rekapitulasi Permohonan yang Ditolak Beserta Alasannya

Pada tahun 2024 tidak ada permohonan informasi publik yang ditolak. Keseluruhan permohonan informasi publik yang masuk ke BBPPTP Surabaya telah dipenuhi.

J. Jumlah Pemohon Informasi Publik Berdasarkan kategori Pengelompokkan

1) Pertanian

Terdapat 23 (dua puluh tiga) permohonan informasi publik terkait pertanian yaitu informasi terkait ketersediaan benih tanaman perkebunan dan layanan pengujian laboratorium

2) Anggaran dan keuangan

Tidak terdapat pemohon informasi publik terkait anggaran dan keuangan.

3) Kepegawaian

Terdapat 11 (sebelas) permohonan informasi publik terkait kepegawaian yaitu informasi tentang lowongan magang atau praktek kerja lapang.

4) Hukum dan Perundang-undangan

Tidak ada permohonan informasi publik terkait hukum dan perundang-undangan.

5) Pengadaan Barang dan Jasa

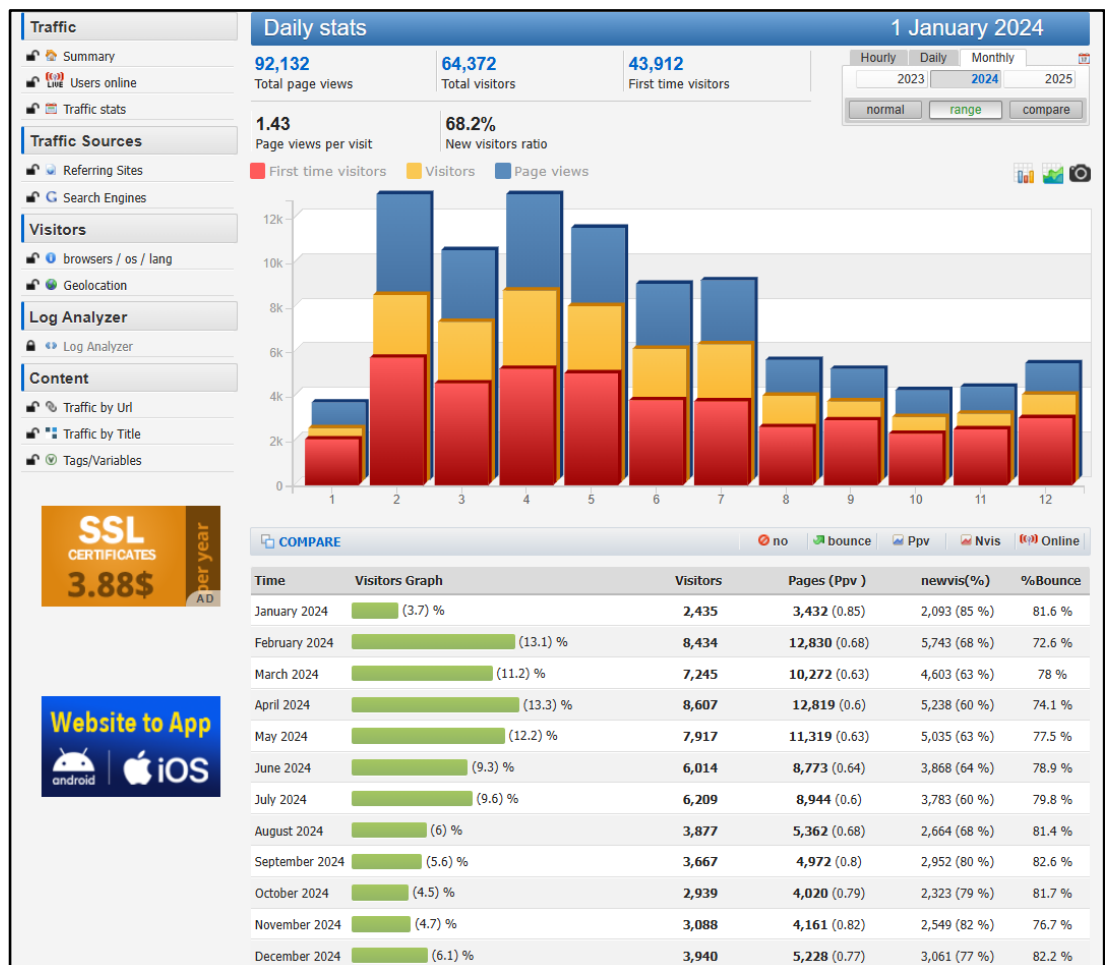
Tidak ada permohonan informasi publik terkait pengadaan **barang** dan jasa.

6) Lainnya

Tidak terdapat permohonan informasi lainnya.

K. Pengelolaan Website Dan Media Sosial

Selama tahun 2024 BBPPTP Surabaya telah merekapitulasi jumlah pengunjung pada laman website resmi BBPPTP Surabaya sebagaimana grafik berikut ini:



Grafik 2. Jumlah Kunjungan ke Website BBPPTP Surabaya Tahun 2024

Sepanjang tahun 2024 jumlah pengunjung website BBPPTP Surabaya mencapai 64.372 pengunjung, 43.912 diantaranya merupakan pengunjung baru. Total halaman yang dikunjungi adalah 92.132 dengan rata-rata mengunjungi 1,43 halaman pada setiap kunjungannya. Jika dibandingkan dengan tahun 2023 jumlah pengunjung website BBPPTP Surabaya pada tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 314,25%. Jumlah pengunjung pada tahun 2023 hanya 13.800 pengunjung. Hal ini dapat dikarenakan semakin

baiknya pengelolaan informasi dan dokumentasi pada website BBPPTP Surabaya.

Selain melalui portal PPID dan website, BBPPTP Surabaya juga memberikan informasi melalui kanal media sosial yaitu Instagram, Facebook dan Youtube. Jumlah rilis konten di media BBPPTP Surabaya tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Rekapitulasi Jumlah Konten Media Sosial Tahun 2024

Bulan	Kanal Media			Youtube
	Instagram	Facebook	Twitter	
Januari	10	9	5	1
Februari	6	6	2	1
Maret	12	7	5	3
April	14	7	3	3
Mei	17	17	16	4
Juni	14	14	14	2
Juli	18	18	17	1
Agustus	18	18	16	1
September	22	18	16	10
Oktober	17	16	14	14
November	11	11	9	9
Desember	13	11	11	0
Total	172	152	128	49

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Pada tahun 2024 jumlah pengikut Instagram BBPPTP Surabaya mengalami peningkatan 7,6% dari 2.639 pengikut menjadi 2.855 pengikut. Jumlah konten yang diunggah ke IG pada tahun 2024 adalah sebanyak 172 konten.
- 2) Pada tahun 2024 jumlah pengikut Facebook BBPPTP Surabaya mengalami peningkatan 4.6% dari 2.700 pengikut menjadi 2.829 pengikut. Jumlah konten yang diunggah pada tahun 2024 adalah sebanyak 152 konten.
- 3) Pada tahun 2024 jumlah konten yang diunggah pada akun twitter adalah 128 konten dengan jumlah pengikut sebanyak 265 pengikut.
- 4) Pada tahun 2024 jumlah konten yang diunggah pada akun Youtube adalah 49 konten dengan jumlah subscriber sebanyak 1.200 subscriber.

L. Inovasi Dan Kolaborasi Layanan Informasi Di Bbpptp Surabaya

BBPPTP Surabaya selalu berusaha meningkatkan pelayanan publik dengan mengembangkan berbagai inovasi layanan. Inovasi layanan BBPPTP Surabaya tersebut adalah sebagai berikut:

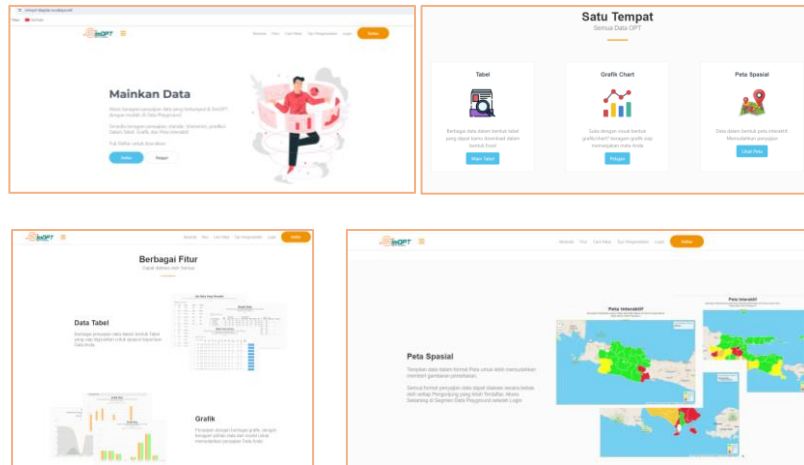
1. SIM OPT

SIM OPT adalah Sistem Informasi Manajemen Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) berbasis website yang memuat data base komoditas dan OPT Perkebunan yang ada di wilayah kerja. Data yang ditampilkan meliputi data luas area tanam, luas serangan OPT, luas pengendalian dan data dukung lainnya yang ditampilkan dalam bentuk grafik, tabel dan peta digital.

Pengguna jasa pada umumnya merupakan pegawai dari sejumlah instansi pemerintah dan sebagian dari kalangan akademisi (dosen/mahasiswa). Hanya sebagian kecil pengguna yang dari kalangan peneliti dan swasta.

Sementara itu, berdasarkan data statistik kunjungan (akses data), diketahui bahwa rata-rata banyaknya data yang diakses pada aplikasi SIM OPT perkebunan sekitar 300 akses data per bulan.

Spesifikasi data yang disediakan pada SIM OPT perkebunan, yaitu : (1) Data diperoleh dari laporan hasil pengamatan serangan OPT Perkebunan di tingkat kabupaten dan provinsi di wilayah kerja BBPPTP Surabaya; (2) Data tersedia mulai tahun 2016 – sekarang, berupa data triwulanan dan data bulanan; (3) Data triwulanan meliputi 8 provinsi yang ada di wilayah kerja BBPPTP Surabaya yaitu Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur , Bali, NTB dan NTT, sedangkan data bulanan meliputi 29 kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Timur.



Gambar 12. Tampilan Dashboard SIM OPT

Aplikasi SIM OPT Perkebunan sejak tahun 2017 telah mengikuti ISO 9001:2015.

2. Bimbingan Teknis Petani Kebun

Selain menggunakan sarana digital, BBPPTP Surabaya menerjunkan langsung ke lapangan petugas layanan khusus untuk memberikan informasi penting terkait perkebunan kepada petani diantaranya dengan program Sistem Dokter Tanaman (SINANDA) dan mobil klinik. Informasi yang diberikan antara lain tentang pengendalian OPT Perkebunan, teknik budidaya tanaman perkebunan dan tata cara memperoleh benih unggul tanaman perkebunan.

M. Kendala Dan Tantangan Beserta Solusi

Pelaksanaan layanan informasi dan dokumentasi publik di BBPPTP Surabaya pada tahun 2024 mengalami beberapa kendala, antara lain:

1. Masyarakat belum banyak mengetahui tentang portal PPID untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, sehingga tidak berkenan ketika diminta persyaratan KTP untuk mendaftar.
2. Pegawai BBPPTP Surabaya belum seluruhnya mengetahui tentang keterbukaan informasi publik yang menjadi kewajiban setiap instansi Pemerintah, sehingga terkadang menjadi hambatan dalam mengkompilasi

informasi publik yang harus disediakan.

3. Layanan email resmi BBPPTP Surabaya dengan domain pertanian.go.id sering mengalami kendala tidak dapat menerima email masuk dan mengirimkan email keluar pada email dengan domain selain pertania.go.id. Selain itu untuk bisa login ke email tersebut, seringkali terjadi error yang mengharuskan untuk reset username dan password. Hal ini tentu menyulitkan petugas dalam mengelola email.

Untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah rekomendasi sebagai tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas layanan informasi di BBPPTP Surabaya, antara lain:

1. Perlu dilakukan sosialisasi tentang keterbukaan informasi publik dan sarananya dengan mengundang pihak terkait.
2. Perlu dilakukan sosialisasi untuk seluruh pegawai BBPPTP Surabaya agar proses pengelolaan informasi dan dokumentasi publik dapat berjalan dengan lebih baik.
3. Perlu dilakukan perbaikan pada email dengan domain pertanian.go.id.

N. PENUTUP

Secara umum pelaksanaan pengelolaan informasi dan dokumentasi publik di BBPPTP Surabaya pada tahun 2024 berjalan dengan lebih baik jika dibandingkan dengan tahun 2023. Hal ini dapat terjadi karena komitmen pimpinan dan disiplin pelaksana tugas. Perbaikan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan informasi dan dokumentasi publik di BBPPTP Surabaya antara lain pembentukan tim pengelola informasi dan dokumentasi, pengalokasian anggaran pada kegiatan PPID, perbaikan sarana prasarana pendukung, melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan PPID.



Gambar 13. Penghargaan BBPPTP Surabaya sebagai Unit Kerja Eselon II Kategori Informatif

Pada tahun 2024 BBPPTP Surabaya berhasil meningkatkan kategori pengelolaan informasi dan dokumentasi publik dari menuju informatif menjadi informatif. BBPPTP Surabaya telah berhasil memenuhi standar pengelolaan layanan informasi dan dokumentasi publik berdasarkan standar pada Kementerian Pertanian.